

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian dan deskripsi dari dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan sumatera dua jalur Kabupaten Musi Rawas Utara dalam rangka percepatan pembangunan daerah Kecamatan Rupit. Disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara berupaya membuat suatu program pembangunan infrastruktur jalan dalam upaya mempersiapkan Daerah Kecamatan Rupit sebagai pusat Pemerintahan dari Kabupaten Musi Rawas Utara, dan hasil dari implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan lingkar barat Kabupaten Malang termasuk implementasi kebijakan yang baik karena implementasi kebijakan tersebut di lihat dari beberapa variable yang berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kebijakan-kebijakan dibuat agar Daerah Rupit mampu dan siap menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara. Daerah Rupit yang lokasinya berada pada jalan perlintasan antar Provinsi secara tidak langsung membuat daerah Rupit padat dilalui kendaraan-kendaraan baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, ini membuat pembangunan pada daerah Rupit untuk mampu mempercepat pembangunan daerah terhambat karena padatnya volume kendaraan pada daerah

Rupit. Hal ini yang mendasari munculnya kebijakan pembangunan mengurai kemacetan pada daerah Rupit dan membuat pembangunan daerah Rupit cepat terealisasi, sumber-sumber kebijakan yang dimaksud mencakup anggaran dana yang mendorong dan memperlancar implementasi agar berjalan dengan efektif. Agar mampu mengurai kemacetan pada daerah Rupit dan membuat pembangunan daerah Rupit cepat terealisasi, sumber-sumber kebijakan yang dimaksud mencakup anggaran dana yang mendorong dan memperlancar implementasi agar berjalan dengan efektif.

b. Sumber-Sumber Kebijakan

Implementasi kebijakan menegaskan standar sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Dalam hal ini terkait dengan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan lintas sumatera dua jalur Kabupaten Musi Rawas Utara yang juga memiliki standar sasaran dalam pelaksanaannya. Standar yang ditetapkan berhubungan dengan pencapaian tujuan program pembangunan infrastruktur jalinsum dua jalur. Upaya pencapaian tujuan yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu BAPPEDA dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang yaitu dengan merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur jalinsum dua jalur sebagai program alternatif untuk mengurangi kemacetan di Daerah Rupit untuk saat ini dan masa mendatang. Dengan adanya program pembangunan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Rupit.

c. Ciri-Ciri Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana

Jalinsum dua jalur yang merupakan program prioritas yang dibuat untuk mengurai kemacetan di daerah Rupit termasuk perencanaan dari bappeda yang masuk dalam

perencanaan daerah jangka Menengah, dan penyelenggaraan pembangunan program jalan tersebut dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara siap bangun jalinsum dua jalur seta pembangun kawasan terbuka hijau dan taman pada kawasan jalinsum dua jalur.

d. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dengan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan BAPPEDA bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dalam hal pembangunan taman, kerjasama tersebut sudah diatur oleh BAPPEDA selaku kordinator. Dinas pekerjaan Umum Penataan Ruang bertanggung jawab atas infrastruktur jalan lintas sumatera dua jalur serta dinas yang ditunjuk juga sebagai pengembang jalinsum dua jalur.

e. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana yang fokus terhadap program-program dan paham akan tujuan sebuah kebijakan pembangunan tersebut akan berdampak pada hasil yang maksimal dalam pembangunan tersebut. Dalam perealisasi jalinsum dua jalur sikap para pelaksana sudah baik karena dilihat dari hasil pembangunan jalinsum dua jalur semua sudah dibangun sesuai standar yang sudah ditetapkan sejak awal, pelaksanaan hanya terhambat masalah waktu yang lumayan lama dari pembangunan tersebut, hal tersebut bukan karena sikap para pelaksana yang kurang baik terhadap pembangunan namun dikarenakan masalah penurunan dana APBD yang dicairkan secara bertahap sehingga untuk pembangunan jalinsum dua jalur dibutuhka waktu yang cukup lama.

f. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Kondisi ekonomi pembangunan jalinsum dua jalur terkendala dengan masalah dana APBD yang menjadi sumber utama pendanaan, penurunan dana yang secara bertahap membuat waktu dari pembagunan jalinsum dua jalur menjadi cukup lama, dan dari kondisi sosial pembangunan tersebut pada awalnya mendapat tentangan dari warga yang memiliki lahan di kawasan yang akan dibangun jalinsum dua jalur, dengan begitu membutuhkan waktu untuk pembebasan lahan dari warga yang bersikeras tidak mau melepaskan lahannya untuk pembangunan jalinsum dua jalur. Setelah dengan sosialisasi yang dilakukan secara lebih kepada beberapa warga yang besikeras tersebut pada akhirnya seluruh pembebasan lahan terselesaikan. Sedangkan pembuatan program jalinsum dua jalur pada awalnya memang murni karena kebutuhan yang diperlukan oleh daerah Rupit untuk persiapan menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara, sehingga jika melihat dari sisi politik program pembangunan jalibar ini tidak ada unsur politik.

2.Dampak implementasi kebijakan pembangunan infratsruktur jalan lintas sumatera dua jalur Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap percepatan pembangunan daerah Rupit yaitu:

- a. Berkurangnya volume kendaraan,dengan adanya jalinsum dua jalur maka masalah kepadatan volume kendaraan pada pusat daerah Rupit bisa terpecahkan
- b. Meningkatnya harga tanah,meningkatnya harga tanah pada kawasan jalinsum dua jalur yang sebelumnya memiliki harga jual rendah karena belum ada akses jalan yang melintasi kawasan tersebut.

c. Membuka peluang usaha, dengan adanya jalinsum dua jalur maka dapat memberikan peluang usaha karena di sepanjang kawasan jalan jallinsum dua jalur tersebut dapat dibangun sebuah tempat usaha.

d. Menambah lowongan pekerjaan, dengan adanya tempat-tempat usaha baru di sepanjang kawasan jalinsum dua jalur tersebut maka akanada banyak lowongan pekerjaan untuk para warga daerah Rupit.

e. Kawasan siap bangun, untuk masa mendatang dipastikan jumlah penduduk pada daerah Rupit akan semakin banyak. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka jalisum dua jalur dijadikan kawasan siap bangun.

3. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan lintas sumatera dua jalur Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu:

- a. Komitmen tim pelaksana program,
- b. Adanya kerjasama terkait kerjasama lintas sektor dan lintas program dan
- c. Sosialisasi yang berkelanjutan.

Faktor yang penghambat implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan lintas sumatera dua jalur Kabupaten Musi Rawas utara, yaitu:

- a. Penurunan Dana APBD, dan
- b. Kesadaran masyarakat

5.2 Saran

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian dilapangan dan pembahasan yang disesuaikan dengan teori serta hasil kesimpulan, maka dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pencairan dana APBD yang seharusnya bisa lebih cepat lagi karena hingga saat ini masih ada infrastruktur jalan yang belum dibangun yang sebenarnya sudah melewati jangka waktu yang ditetapkan. Dari hal ini kerjasama dengan pihak swasta bias dilakukan dengan kesepakatan tertentu sehingga waktu dari sebuah pembangunan tidak terhambat masalah pencairan dana APBD.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kegunaan jalan serta menaati peraturan yang telah ditetapkan terhadap pendirian bangunan di pinggir jalan lintas sumatera dua jalur Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan cara sosialisasi yang lebih baik dan dilaksanakan jauh-jauh hari secara bertahap sehingga saat pelaksanaan tidak ada lagi kendala dengan masyarakat.
3. Perlunya partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat dari adanya jalan lintas sumatera dua jalur, mereka berhak untuk ikut serta memelihara dan menjaga keutuhan jalan lintas sumatera dua jalur Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut dengan cara aktif melakukan pengecekan pada infrastruktur jalan serta segera melaporkan jika ada kerusakan sehingga akan segera diperbaiki oleh pemerintah
4. Kerjasama yang dijalin dengan pihak luar untuk semakin memaksimalkan fungsi dari jalibar kedepannya. Dari hal ini akan membuat pekerjaan pemerintah lebih ringan dan dapat semakin cepat dalam melaksanakan pembangunan.